

ABSTRAK

Atikah Firdaus. 2024. *Analisis Yuridis Framing Media Terkait Netralitas ASN Dalam Masa Kampanye Pemilu 2024 Terhadap Legitimasi Pemerintahan Dan Sistem Ketatanegaraan*. Skripsi. Program Studi Hukum, FH Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji *framing* media terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kampanye Pemilu 2024. Studi ini menganalisis penyajian berita oleh Tempo, Kompas TV, dan Metro TV. Metodologi penelitian menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris, meliputi analisis konten media komparatif dan survei persepsi publik. Fokus analisis mencakup implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian mengungkapkan variasi signifikan dalam *framing* antar media. Tempo menyoroti dugaan upaya sistematis rezim dalam memobilisasi ASN, Kompas mengaitkan pelanggaran dengan budaya feodalistik dan sistem patronase, sementara Metro TV berfokus pada pelaporan temuan konkret. *framing* media ini berdampak substansial pada persepsi publik tentang netralitas ASN dan efektivitas sistem ketatanegaraan. Selain itu implementasi kebebasan pers masih menghadapi tantangan kompleks, termasuk intimidasi terhadap jurnalis, yang dapat mempengaruhi peran media dalam mekanisme *checks and balances*. Lebih lanjut, pelanggaran netralitas ASN selama kampanye pemilu terbukti memiliki implikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan, sistem ketatanegaraan dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberitaan media tidak hanya mencerminkan realitas politik, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Saran Peneliti pentingnya komitmen semua pemangku kepentingan dalam membangun fondasi pemerintahan yang legitimate, stabil, dan demokratis pasca Pemilu 2024.

Kata Kunci: *Framing* Media, Netralitas ASN, Legitimasi Pemerintahan, Sistem Ketatanegaraan, Pemilu 2024, Kebebasan Pers

ABSTRACT

Atikah Firdaus. 2024. Juridical Analysis of Media Framing Related to the Neutrality of Civil Servants in the 2024 Election Campaign Period on the Legitimacy of the Government and Constitutional System. Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, University of PGRI Madiun. Supervisor (I) Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

This research examines media framing regarding the neutrality of the State Civil Service (ASN) during the 2024 Election campaign. This study analyzes news presentation by Tempo, Kompas TV, and Metro TV. The research methodology combines normative-juridical and empirical approaches, including comparative media content analysis and public perception surveys. The focus of the analysis includes the implementation of Law no. 40 of 1999 concerning the Press and Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. The results revealed significant variations in framing between media. Tempo highlighted the regime's alleged systematic efforts to mobilize ASN, Kompas linked violations to feudalistic culture and the patronage system, while Metro TV focused on reporting concrete findings. This media framing has a substantial impact on public perceptions about the neutrality of ASN and the effectiveness of the constitutional system. Apart from that, the implementation of press freedom still faces complex challenges, including intimidation of journalists, which can affect the role of the media in checks and balances mechanisms. Furthermore, violations of ASN's neutrality during election campaigns have been proven to have serious implications for the legitimacy of government, the constitutional system and democratic principles. Media reporting not only reflects political reality, but also has the potential to shape public opinion and influence voter behavior. Researcher's suggestion is the importance of the commitment of all stakeholders in building the foundations of a legitimate, stable and democratic government after the 2024 elections.

Keywords : *Media Framing, ASN Neutrality, Government Legitimacy, Constitutional System, 2024 Elections, Press Freedom*